

PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI OLEH PENGGUNA JASA DENGAN METODE *E-PURCHASING* DI DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA

Khairul Imam¹, Sarwono Hardjomuljadi² dan Mawardi Amin³

¹Prodi Magister Teknik Sipil, Universitas Mercu Buana Jakarta, Jl. Meruya Selatan No. 1 Rt 4/Rw 1, Kec. Kembangan, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11650

Email korespondensi: imamkhairul1978@yahoo.co.id

²Prodi Magister Teknik Sipil, Universitas Mercu Buana Jakarta, Jl. Meruya Selatan No.1 Rt 4/Rw 1, Kec. Kembangan, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11650

Email: sarwonohm2@yahoo.co.id

³Prodi Magister Teknik Sipil, Universitas Mercu Buana Jakarta, Jl. Meruya Selatan No.1 Rt 4/Rw 1, Kec. Kembangan, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11650

Email: mawardi.a@gmail.com

ABSTRAK

Sebagai bagian dari penerapan *good governance* di Indonesia, saat ini pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan secara elektronik. Hal ini membuat calon penyedia jasa harus menyiapkan tiap persyaratan secara baik serta bersaing secara jujur. Penyedia jasa yang nantinya akan menjalankan kontrak konstruksi diharapkan adalah dari hasil pemilihan yang baik. Salah satu metode pemilihan penyedia jasa konstruksi di Dinas Bina Marga DKI Jakarta yaitu metode *e-purchasing*. Terdapat cukup banyak faktor yang mempengaruhi pemilihan penyedia jasa konstruksi dengan metode *e-purchasing*. Dengan menggunakan analisis *Relative Importance Index (RII)*, ditemukan bahwa urutan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi di Dinas Bina Marga DKI yaitu (i) Persyaratan Administrasi Penyedia Pekerjaan Konstruksi (RII: 0,890), (ii) Respons Terhadap Pemeriksaan (RII: 0,866), (iii) Pelaksanaan Pekerjaan (RII: 0,840), (iv) Komitmen Tanggung Jawab Masa Pemeliharaan (RII: 0,834), (v) Kelengkapan Teknis Penyedia Pekerjaan Konstruksi (RII: 0,791), (vi) Lain-lain (RII: 0,760), (vii) Pengalaman Kerja (RII: 0,744). Faktor yang paling penting adalah Persyaratan Administrasi Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang dipengaruhi oleh indikator penyedia jasa tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak masuk daftar hitam.

Kata kunci: Penyedia jasa, *e-purchasing*, RII

ABSTRACT

As a part of the implementation of *proper governance* in Indonesia, currently the procurement of government goods/services is carried out electronically. This makes prospective service providers have to prepare each requirement properly and compete honestly. The service provider who will carry out the construction contract is expected to come from a good selection. One method of selecting construction service providers at the Highways Office of DKI Jakarta is the *e-purchasing* method. There are quite a number of factors that influence the selection of construction service providers using the *e-purchasing* method. By using the *Relative Importance Index (RII)* analysis, it was found that the order of factors that influence the selection of construction work providers at the Highways Office of DKI Jakarta are (i) Administrative Requirements for Construction Work Providers (RII: 0.890), (ii) Responses to Inspections (RII: 0.866), (iii) Work Implementation (RII: 0.840), (iv) Maintenance Period Responsibility Commitment (RII: 0.834), (v) Technical Completeness of Construction Work Providers (RII: 0.791), (vi) Others (RII: 0.760), (vii) Work Experience (RII: 0.744). The most important factor is the Administrative Requirements of

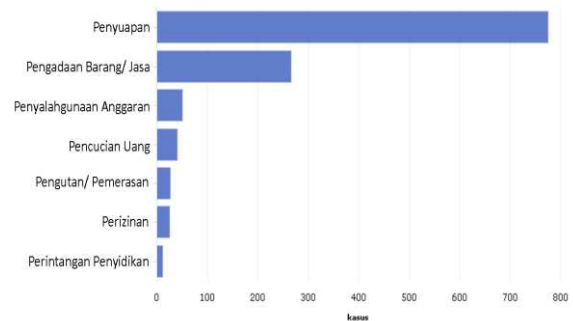
Construction Works Providers which are influenced by indicators that the service provider is not under court supervision and is not blacklisted.

Keywords: Service provider, e-purchasing, RII

1. PENDAHULUAN

Reformasi politik dan pemerintahan melahirkan *good governance* yang diharapkan dapat membawa dampak perubahan dan peningkatan dalam pelayanan publik. Namun pada kenyataannya, sistem pemerintahan yang baik masih dianggap belum optimal, dan manfaatnya diabaikan oleh masyarakat luas. Hal ini terlihat dari maraknya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang masih sering terjadi. Konsep *good governance* dalam hal efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi pemerintahan dinilai belum optimal dan kualitas pelayanan publik masih jauh dari yang diharapkan. Isu birokrasi yang muncul terkait dengan penerapan *good governance* tidak terkecuali pada pengadaan barang/jasa pemerintah yang masih sangat rentan terhadap korupsi. Selain itu, mengingat sifat korupsi Indonesia, pengadaan barang/jasa menempati urutan kedua dalam sebagian besar kasus korupsi.

Sebelum tahun 2008, pengadaan barang dan jasa pemerintah menggunakan sistem tradisional. Sistem ini memerlukan komunikasi langsung dan pertemuan langsung antara penyedia layanan dan panitia lelang. Namun, ada banyak perbedaan dalam proses pengadaan produk dan layanan secara tradisional. Penyimpangan tersebut terutama pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa [11].



Gambar 1. Jumlah Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2004 – 2021

Sumber: [9]

Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) yang dilakukan dengan cara *e-tendering* yaitu tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan adalah hal-hal yang perlu dilakukan dalam upaya untuk menanggulangi kelemahan - kelemahan dan kerumitan dalam proses pengadaan serta untuk lebih meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas, akses pasar dan daya saing usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit serta memenuhi akses informasi yang memiliki tenggat waktu yang jelas. Penggunaan internet sebagai sarana informasi dan komunikasi sangat bermanfaat pada proses pengadaan barang dan jasa dengan sistem elektronik. Dengan sistem lelang elektronik ini, maka intensitas pertemuan antara panitia/kelompok kerja pengadaan dengan penyedia barang/jasa atau peserta lelang dapat diminimalisir.

Manfaat dari berkembangnya teknologi turut dirasakan pada dunia pengadaan barang/jasa. Selain itu juga pemanfaatan

teknologi dalam pemerintahan, berdampak dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dan lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Dunia pengadaan barang/jasa melakukan konversi dari semula pengadaan dilakukan secara tradisional kemudian beralih menjadi pengadaan yang dilakukan secara elektronik. Dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 37, Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan [13]. Maksud dari butir ini adalah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik terutama berbasis web dan internet. *E-procurement* dianggap sebagai salah satu ide terkini *e-government* yang paling efektif memberikan hasil nyata dalam bentuk transparansi dan efisiensi proses pengadaan pemerintah.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membuat pembaruan dengan memperkenalkan sistem katalog elektronik. Pada awal tahun 2012 Katalog elektronik untuk memulai pengadaan dengan cara *e-purchasing*. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah suatu lembaga yang mengembangkan dan mengelola Katalog elektronik untuk dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) dalam rangka pengadaan barang dan jasa memenuhi kebutuhan kantor. Dengan sistem ini pengadaan barang/jasa dianggap sangat efektif dan efisien dalam ketepatan serta kecepatan waktu dan biaya lebih hemat. Keterbukaan sistem ini dapat dilihat secara jelas karena daftar, jenis, spesifikasi teknis serta harga barang dari penyedia ditampilkan secara elektronik dan dapat dijangkau oleh publik secara luas. Dengan adanya sistem yang transparan, maka

pengguna maupun penyedia jasa secara sehat melaksanakan proses pelelangan barang/jasa.

Sejak tahun 2013 Dinas Bina Marga Pemprov DKI Jakarta menjadi salah satu dinas yang telah menetapkan kebijakan pelaksanaan *e-purchasing* dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi. Dinas Bina Marga Pemprov DKI Jakarta ini merupakan institusi yang memegang peranan penting dalam pelayanan publik tentang sarana dan prasarana infrastruktur jalan, jembatan dan trotoar. Hal ini sangat menunjang perekonomian di Pemprov DKI Jakarta. Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana bidang jalan dan jembatan, merupakan serangkaian tanggung jawab yang dipikul dinas ini dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menunjang pelaksanaan pembangunan di Pemprov DKI Jakarta. Dalam rangka untuk mencukupi semua kebutuhan belanja publik itu dengan melakukan pengadaan barang/jasa secara *e-purchasing*.

Dinas Bina Marga Pemprov DKI melaksanakan proses *e-purchasing* di katalog lokal Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta. Dalam e-katalog ini terdapat banyak Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang menawarkan jasa/produk dengan standar teknis yang sama namun dengan harga yang berbeda-beda. Pengguna Jasa harus menentukan pilihan terhadap para Penyedia Pekerjaan Konstruksi ini sesuai dengan kebutuhan dalam pagu anggaran Instansi masing-masing. Faktor-Faktor yang berpengaruh pada proses pelelangan pembangunan jalan di DKI Jakarta dalam menggunakan e-katalog antara lain (i) asas pengadaan barang/jasa pemerintah, (ii) cara pelelangan proyek pembangunan jalan, (iii) keandalan infrastruktur teknologi informasi (TI), (iv) problematika budaya, (v) biaya, (vi) problematika tentang hukum, (vii) kemampuan pengetahuan tentang e-Procurement dan (viii) polemik penerapan e-katalog [21].

Berikut adalah data anggaran dan jumlah paket pekerjaan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dari tahun ke tahun

Tabel 1. Anggaran dan Kegiatan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

No.	Tahun	Anggaran (miliar Rp)	Jumlah Kegiatan
1.	2013	2,707	402
2.	2014	6,126	309
3.	2015	3,463	96
4.	2016	3,188	38
5.	2017	2,733	57
6.	2018	2,402	62
7.	2019	2,560	67

Sumber: [3]

Dari uraian latar belakang yang disampaikan tersebut, menarik untuk dilakukan penelitian mengenai *e-purchasing* di tingkat pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk:

- Untuk mengetahui dan menganalisis urutan faktor yang mempengaruhi Pengguna Jasa dalam menentukan pemilihan penyedia Pekerjaan Konstruksi secara *e-purchasing* di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
- Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang paling penting dalam mempengaruhi pemilihan penyedia Pekerjaan Konstruksi secara *e-purchasing* di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

E-Purchasing

Definisinya adalah sistem pembelian barang/jasa melalui sistem e-katalog [12]. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 merupakan dasar hukum diwajibkannya setiap instansi pemerintah melakukan pengadaan melalui *e-purchasing*. Metode *E-Purchasing* dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi.

Sistem *e-purchasing* di Indonesia dapat dijangkau melalui alamat www.e-katalog.lkpp.go.id. Atau melalui katalog lokal di daerah masing-masing.

Sejak Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 memberlakukan *e-purchasing*, namun sifatnya yang tidak wajib dan masih kecilnya jumlah jenis komoditas yang tercantum di e-katalog membuat penggunaannya tidak umum dalam pengadaan barang/jasa di Indonesia. Pengadaan kendaraan dinas roda dua, roda empat, kendaraan dinas lainnya, obat, benih, dan barang/jasa lainnya yang pemakaiannya spesifik untuk sektor tertentu adalah pengadaan yang dapat dilakukan dengan *e-purchasing* pada masa itu.

Dengan adanya Perpres Nomor 4 Tahun 2015 keadaan tersebut di atas berubah. Pengadaan *e-purchasing* yang diwajibkan dan semakin bervariasinya komoditas yang tercantum di e-katalog menjadikan sistem *e-purchasing* semakin marak digunakan. Hal tersebut menimbulkan masalah yang menarik untuk menjadi bahan penelitian tentang penggunaan *e-purchasing* dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Indonesia.

Hubungan penerapan elektronik katalog (istilah lain dari *e-purchasing*) terhadap efisiensi pengadaan dan ketersediaan obat adalah ditemukan bahwa penerapan *e-purchasing* berpengaruh positif terhadap efisiensi dan ketersediaan obat [16] [2].

Hubungan kepuasan pengguna *e-purchasing* menemukan bahwa kualitas layanan dan kualitas sistem *e-purchasing* berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna terhadap sistem *e-purchasing* [5].

Menurut persepsi penyedia bidang usaha komunikasi dan informatika dengan adanya perbedaan efektifitas pengadaan pemerintah sebelum dan setelah penerapan *e-purchasing* adalah penggunaan *e-purchasing* meningkatkan efektifitas dalam pencapaian tujuan *e-procurement*. Sepengetahuan peneliti, belum ada penelitian mengenai pengaruh *e-purchasing* terhadap transparansi, akses pasar, dan

efisiensi proses pengadaan barang/jasa pemerintah [4].

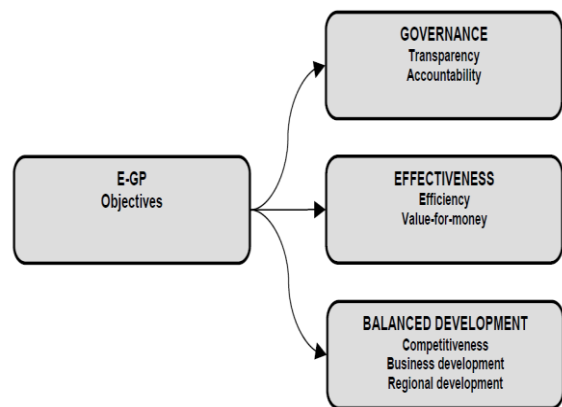
Menurut Wibowo [14], ada beberapa catatan penting mengenai *e-purchasing* yaitu (i) sistem ini tidak memiliki ukuran yang jelas untuk menentukan siapa yang terpilih menjadi penyedia (ii) sistem ini mengurangi unsur kompetisi karena perusahaan yang belum terdaftar di katalog elektronik tidak diperbolehkan untuk dipilih menjadi penyedia. Padahal, masih menurut Wibowo [14], jika merujuk pada manifestasi yang diberlakukan di *European Union* (Uni Eropa), perusahaan manapun yang ingin berpartisipasi tidak boleh dirintangi (Pasal 34 (1) dan (2) *Directive* 2014/24/EU).

Menurut pendapat Kim [8] dalam Wibowo [14] di Korea Selatan bahwa penerapan *e-purchasing* dikritik keras oleh lembaga audit pemerintah negara tersebut karena meningkatkan peluang terjadinya korupsi. Implementasi *e-purchasing* di Korea Selatan saat ini, diperketat aturannya, terutama untuk pengadaan yang bernilai di atas \$50,000. Berdasarkan pengalaman negara-negara tersebut, Indonesia sepatutnya lebih kritis dalam menyusun peraturan-peraturan dan sistem *e-purchasing*.

Menurut Siahaya [19] tujuan dari *e-procurement* sebagai berikut: a. Peningkatan keterbukaan dan akuntabilitas b. Peningkatan akses pasar dan persaingan bisnis c. Meningkatkan efisiensi proses pengadaan d. Dukungan untuk proses pemantauan dan audit e. Penuhi kebutuhan tentang akses informasi terbaru.

The Asian Development Bank, The Inter-American Development Bank and The World Bank (2004) menjelaskan 3 tujuan *e-procurement* yang tertera pada gambar 2, yaitu:

- Governance* dengan peningkatan keterbukaan dan akuntabilitas
- Effectiveness* meliputi efisiensi dan value-for-money
- Balanced Development* melalui *competitiveness, business development, dan regional development*



Gambar 2. E-GP Objectives dalam Electronic Government Procurement, Roadmap

Sumber: [20]

Beberapa prinsip dalam pelaksanaan *e-procurement* (*The principles for MDB e-procurement systems*) yang diungkapkan oleh *Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Asian Development Bank Institute, dan Public Procurement Service of the Republic of Korea* (2006:17) antara lain: (i) *Economy, efficiency and transparency*, (ii) *Nondiscrimination and equality of access*, (iii) *Open competition*, (iv) *Accountability*, (v) *Security of process*.

Tujuan pengadaan

Tujuan pengadaan secara elektronik dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 107 adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, mendukung proses monitoring dan audit, serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real-time*.

Transparansi

Menurut Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh

masyarakat pada umumnya. Terdapat berbagai definisi transparansi menurut para ahli. Menurut Mardiasmo [10] Transparansi sebagai keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan penyebaran kuisisioner dimana bertujuan untuk mengetahui urutan peringkat faktor yang mempengaruhi pengguna jasa dalam menentukan pemilihan penyedia Pekerjaan Konstruksi secara *e-purchasing*.

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas (X) yang merupakan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundangan, penelitian terdahulu serta fenomena di lapangan sehingga sebelum melakukan penelitian, variabel yang disajikan akan terlebih dahulu divalidasi ke pakar untuk menguji sesuai tidaknya variabel yang digunakan dengan fakta dan kebutuhan dalam penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah persyaratan administrasi penyedia pekerjaan konstruksi (x1), kelengkapan teknis penyedia pekerjaan konstruksi (x2), pengalaman kerja (x3), pelaksanaan pekerjaan (x4), komitmen tanggung jawab masa pemeliharaan (x5), respons terhadap pemeriksaan (x6), lain-lain (x7).

Data diolah dengan menggunakan *Microsoft Excel* untuk mendapatkan nilai *Relative Importance Index* (RII). Pengujian pengolahan data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas.

Uji validitas

Hartono [7] mengemukakan validitas menunjukkan seberapa nyata suatu pengujian mengukur apa yang semestinya diukur. Uji validitas dilakukan dengan maksud memberi keyakinan bahwa alat ukur yang digunakan betul-betul mengukur

apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas dilakukan dengan melihat nilai *Pearson Product Moment Correlation*. Validitas diperlukan untuk membuktikan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mencari validitas suatu item [17]. Kaidah keputusan uji validitas yaitu:

- (i) Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ artinya valid,
- (ii) Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ artinya tidak valid

Uji reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan barometer tingkat kemampuan atau konsistensi suatu alat ukur (kuesioner). Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal apabila dalam pengukurannya dari waktu ke waktu dapat memberikan hasil yang sama atau konsisten. Pengujian reliabilitas instrumen, peneliti menggunakan pisah dua (*split half method*) terdiri dari item bernomor ganjil dan item bernomor genap. Setelah itu keduanya dikorelasikan menggunakan korelasi *rank* atau *Spearman*. Langkah-langkah menguji reliabilitas instrumen Akdon and S. Hadi [1] yaitu:

- a. Menghitung total skor
- b. Menghitung korelasi product moment (r_b)
- c. Menghitung reliabilitas dengan rumus Spearman Brown:

$$r_{hitung} = \frac{2r_b}{1+r_b} \quad (1)$$

Kaidah keputusan yaitu:

- (i) jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ berarti reliabel sedangkan,
- (ii) jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka tidak reliabel.

Relative important index (RII)

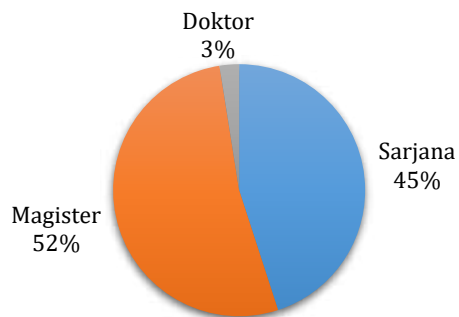
Relative Importance Index (RII) digunakan untuk menentukan peringkat kriteria berdasarkan kepentingan relatifnya [15]. RII dihitung dengan persamaan:

$$RII = \frac{\sum W}{A \times N} \quad (2)$$

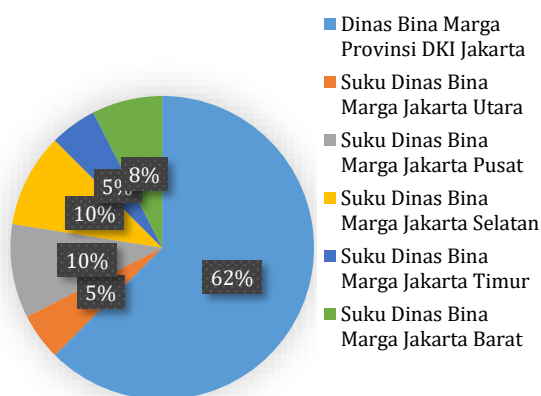
dengan W = bobot tiap faktor, A = bobot terbesar pada penelitian, N = total jumlah responden

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

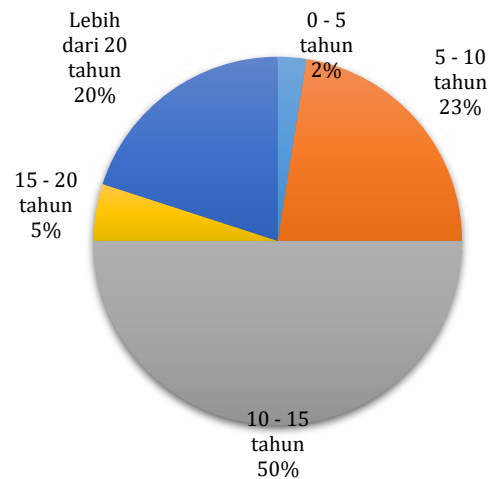
Populasi pada penelitian ini merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam proses *e-purchasing* di Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Adapun pihak yang menjadi populasi hanya dari sisi pemberi tugas yang terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan dan Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) Kecamatan di DKI Jakarta.



Gambar 3. Gambaran Pendidikan Terakhir Responden



Gambar 4. Responden Berdasarkan Instansi



Gambar 5. Gambaran Lama Masa Kerja Responden

Hasil uji validitas dan uji reliabilitas

Tabel 2. Rekapitulasi Uji Validitas

N o.	Variabel	Indikator	r_{hitung}	r_{tabel}	Ket
1.	Persyaratan Administrasi Penyedia Pekerjaan Konstruksi	X.1.1.	0.467	0.312	Valid
		X.1.2.	0.441	0.312	Valid
		X.1.3.	0.508	0.312	Valid
		X.1.4.	0.326	0.312	Valid
		X.1.5.	0.335	0.312	Valid
		X.1.6.	0.508	0.312	Valid
2.	Kelengkapan Teknis Penyedia Pekerjaan Konstruksi	X.2.1.	0.320	0.312	Valid
		X.2.2.	0.381	0.312	Valid
		X.2.3.	0.705	0.312	Valid
		X.2.4.	0.460	0.312	Valid
		X.2.5.	0.494	0.312	Valid
		X.2.6.	0.418	0.312	Valid

<i>N o.</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>r_{hitung}</i>	<i>r_{tabel}</i>	<i>Ket</i>
3.	Pengalaman Kerja	X.3.1.	0.341	0.312	Valid
		X.3.2.	0.711	0.312	Valid
		X.3.3.	0.768	0.312	Valid
		X.3.4.	0.536	0.312	Valid
4.	Pelaksanaan Pekerjaan	X.4.1	0.438	0.312	Valid
		X.4.2	0.388	0.312	Valid
		X.4.3	0.600	0.312	Valid
		X.4.4	0.323	0.312	Valid
		X.4.5	0.414	0.312	Valid
		X.4.6	0.481	0.312	Valid
		X.4.7	0.343	0.312	Valid
		X.4.8	0.388	0.312	Valid
		X.4.9	0.459	0.312	Valid
		X.4.10	0.487	0.312	Valid
		X.4.11	0.705	0.312	Valid
		X.4.12	0.521	0.312	Valid
		X.4.13	0.319	0.312	Valid
		X.4.14	0.515	0.312	Valid
		X.4.15	0.400	0.312	Valid
		X.4.16	0.441	0.312	Valid
5.	Komitmen Tanggung	X.5.1.	0.618	0.312	Valid

<i>N o.</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>r_{hitung}</i>	<i>r_{tabel}</i>	<i>Ket</i>
	Jawab Masa Pemeliharaan	X.5.2.	0.529	0.312	Valid
		X.5.3.	0.573	0.312	Valid
		X.5.4.	0.544	0.312	Valid
6.	Respons Terhadap Pemeriksaan	X.6.1.	0.661	0.312	Valid
		X.6.2.	0.660	0.312	Valid
		X.6.3.	0.496	0.312	Valid
		X.6.4.	0.515	0.312	Valid
		X.6.5.	0.539	0.312	Valid
		X.6.6.	0.496	0.312	Valid
7.	Lain-lain	X.7.1.	0.554	0.312	Valid
		X.7.2.	0.844	0.312	Valid

Tabel 3. Rekapitulasi Uji Reliabilitas

<i>N o.</i>	<i>Variabel</i>	<i>r_{hitung}</i>	<i>r_{tabel}</i>	<i>Keterangan</i>
1.	X. 1. Persyaratan Administrasi Penyedia Pekerjaan Konstruksi	0.321	0.312	Reliabel
2.	X. 2. Kelengkapan Teknis Penyedia Pekerjaan Konstruksi	0.598	0.312	Reliabel
3.	X. 3. Pengalaman Kerja	0.498	0.312	Reliabel
4.	X. 4. Pelaksanaan Pekerjaan	0.745	0.312	Reliabel
5.	X. 5. Komitmen Tanggung	0.374	0.312	Reliabel

<i>N o.</i>	<i>Variabel</i>	<i>r_{hitung}</i>	<i>r_{tabel}</i>	<i>Keterangan</i>
	Jawab Masa Pemeliharaan			
6.	X. 6. Respons Terhadap Pemeriksaan	0.47 2	0.31 2	Reliabel
7.	X. 7. Lain-lain	0.04 2	0.00 0	Reliabel

Hasil analisis data dengan *relative importance index (RII)*

Peringkat variabel yang menjadi gambaran dalam penerapan *e-purchasing* pada Pengadaan Barang di Dinas Bina Marga DKI Jakarta dilakukan dengan menggunakan analisis *Relative Importance Index (RII)* guna memperoleh pandangan masing-masing pihak yang telah melaksanakan *e-purchasing*.

Tabel 4. Hasil Analisis RII Terhadap Faktor Persyaratan Administrasi Penyedia Pekerjaan Konstruksi

<i>No</i>	<i>Variabel X1</i>	<i>RII</i>
X.1.1.	Bergabung dalam asosiasi pekerjaan	0.780
X.1.2.	Alamat kantor jelas	0.860
X.1.3.	Tidak pailit atau dalam proses pailit	0.930
X.1.4.	Direksi tidak sedang dalam proses pidana	0.880
X.1.5.	Tidak dalam pengawasan pengadilan	0.945
X.1.6.	Tidak masuk dalam daftar hitam	0.945

Tabel 5. Hasil Analisis RII Terhadap Faktor Kelengkapan Teknis Penyedia Pekerjaan Konstruksi

<i>No</i>	<i>Variabel X2</i>	<i>RII</i>
X.2.1.	Mempunyai tenaga ahli yang mencukupi	0.845

<i>No</i>	<i>Variabel X2</i>	<i>RII</i>
X.2.2.	Peralatan memadai	0.810
X.2.3.	Jarak AMP / Batching plan ke lokasi pekerjaan	0.735
X.2.4.	Ketersediaan stok material	0.795
X.2.5.	Mempunyai tenaga laboratorium untuk quality control	0.755
X.2.6.	Ketersediaan teknisi peralatan	0.805

Tabel 6. Hasil Analisis RII Terhadap Faktor Pengalaman Kerja

<i>No</i>	<i>Variabel X3</i>	<i>RII</i>
X.3.1.	Pernah melaksanakan pekerjaan sejenis	0.755
X.3.2.	Pernah tidaknya bersengketa dengan Pengguna Jasa	0.760
X.3.3.	Sedang melaksanakan pekerjaan di tempat lain	0.725
X.3.4.	Pernah melaksanakan mock up / pengenalan produk	0.735

Tabel 7. Hasil Analisis RII Terhadap Faktor Pelaksanaan Pekerjaan

<i>No</i>	<i>Variabel X4</i>	<i>RII</i>
X.4.1	Ketersediaan tenaga K3	0.845
X.4.2	Ketersediaan perlengkapan K3	0.840
X.4.3	Koordinasi dengan semua pihak di lapangan	0.885
X.4.4	Ketepatan waktu pelaksanaan fisik	0.895
X.4.5	Ketepatan mutu pelaksanaan	0.920
X.4.6	Peralatan kerja yang mencukupi	0.815
X.4.7	Tenaga lapangan tidak dibebani pekerjaan di lokasi lain	0.790
X.4.8	Respons terhadap arahan Pengguna Jasa	0.820
X.4.9	Kerja sama dengan tim teknis Pengguna Jasa	0.795

No	Variabel X4	RII
X.4.10	Ketersediaan tenaga administrasi pekerjaan	0.795
X.4.11	Kelengkapan administrasi / pelaporan pekerjaan	0.885
X.4.12	Ketepatan waktu pengurusan administrasi pekerjaan	0.920
X.4.13	Aktif mengikuti rapat koordinasi	0.835
X.4.14	Aktif berkonsultasi terhadap permasalahan lapangan	0.880
X.4.15	Strategi penyedia dalam penanganan permasalahan (ditangani sendiri atau diarahkan ke Pengguna)	0.770
X.4.16	Komitmen terhadap pekerjaan tambahan yang menunjang pekerjaan (pembersihan tali air, menggeser MCB, dll)	0.750

Tabel 8. Hasil Analisis RII Terhadap Faktor Komitmen Tanggung Jawab Masa Pemeliharaan

No	Variabel X5	RII
X.5.1.	Ada tidaknya personel yang bisa dihubungi	0.815
X.5.2.	Kecepatan merespons klaim pengguna jasa	0.865
X.5.3.	Kecepatan melaksanakan perbaikan di lapangan	0.865
X.5.4.	Ada tidaknya inisiatif perbaikan jika ada kerusakan	0.79

Tabel 9. Hasil Analisis RII Terhadap Faktor Respons Terhadap Pemeriksaan

No	Variabel X6	RII
X.6.1 .	Komitmen mendampingi Pengguna Jasa pada waktu pemeriksaan	0.940
X.6.2 .	Tersedianya personel lapangan pada waktu pemeriksaan	0.890
X.6.3 .	Kecepatan menyediakan administrasi pekerjaan yang diminta	0.860
X.6.4 .	Ketepatan mengikuti jadwal pemeriksaan	0.860

No	Variabel X6	RII
X.6.5 .	Ketersediaan peralatan yang diminta untuk pelaksanaan lapangan	0.875
X.6.6 .	Kepatuhan terhadap hasil pemeriksaan	0.770

Tabel 10. Hasil Analisis RII Terhadap Faktor Lain-lain

No	Variabel X7	RII
X.7.1.	Respons terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat	0.730
X.7.2.	Komitmen terhadap proses hukum (Polisi, Kejaksaan)	0.790

Urutan faktor yang mempengaruhi pengguna jasa dalam menentukan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi secara *e-purchasing* di dinas bina marga provinsi DKI Jakarta

Terdapat 7 (tujuh) faktor yang mempengaruhi pengguna jasa dalam menentukan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi secara *e-purchasing* di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta yaitu

- faktor Persyaratan Administrasi Penyedia Pekerjaan Konstruksi,
- Faktor Kelengkapan Teknis Penyedia Pekerjaan Konstruksi,
- Pengalaman Kerja,
- Pelaksanaan Pekerjaan,
- Komitmen Tanggung Jawab Masa Pemeliharaan,
- Respons Terhadap Pemeriksaan, dan
- Faktor lain-lain.

Faktor yang paling penting dalam mempengaruhi pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi secara *e-purchasing* di dinas bina marga provinsi DKI Jakarta

Ditinjau dari peringkat faktor yang disajikan berdasarkan hasil analisis RII, ditemukan bahwa faktor yang paling penting dalam mempengaruhi pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi secara *e-purchasing* di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta yaitu

faktor Persyaratan Administrasi Penyedia Pekerjaan Konstruksi. Adapun faktor ini dianggap paling penting karena suatu penyedia jasa dalam perannya mengikuti proses pengadaan barang/jasa perlu mempersiapkan persyaratan administrasi yang lengkap dan legal secara hukum.

Hasil penelitian ini sekaligus mendukung penelitian W. Hartono, L. Nurhidayah, and Sugiyarto [18] yang menyimpulkan bahwa aspek administrasi merupakan aspek dengan bobot paling besar sebagai penentu pemilihan rekanan jasa konstruksi/kontraktor.

Sedangkan jika ditinjau dari indikator penelitian, ditemukan bahwa indikator (i) tidak termasuk dalam pengawasan pengadilan dan (ii) tidak termasuk dalam urutan daftar hitam merupakan indikator yang paling penting dalam mempengaruhi pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi secara *e-purchasing* di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

Artinya bahwa pengguna jasa dalam proses pemilihan penyedia jasa sangat mengedepankan status hukum dari penyedia jasa sehingga diharapkan pengguna jasa dapat mengantisipasi timbulnya hal-hal yang bersifat cacat hukum pada saat pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.

Hal ini mendukung penelitian G. N. Pio, I. N. Sutarja, and I. W. Yansen [6] bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pemilihan pemenang lelang jasa konstruksi adalah perusahaan/ penyedia jasa tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak masuk dalam daftar hitam.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan tentang pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi oleh pengguna jasa dengan metode *e-purchasing* di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Urutan faktor yang mempengaruhi Pengguna Jasa dalam menentukan pemilihan penyedia Pekerjaan

Konstruksi secara *e-purchasing* di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta yaitu:

- a. Persyaratan Administrasi Penyedia Pekerjaan Konstruksi (RII: 0,890)
 - b. Respons Terhadap Pemeriksaan (RII: 0,866)
 - c. Pelaksanaan Pekerjaan (RII: 0,840)
 - d. Komitmen Tanggung Jawab Masa Pemeliharaan (RII: 0,834)
 - e. Kelengkapan Teknis Penyedia Pekerjaan Konstruksi (RII: 0,791)
 - f. Lain-lain (RII: 0,760)
 - g. Pengalaman Kerja (RII: 0,744)
2. Faktor yang paling penting dalam mempengaruhi pemilihan penyedia Pekerjaan Konstruksi secara *e-purchasing* di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta adalah Persyaratan administrasi penyedia pekerjaan konstruksi. faktor ini dianggap paling penting karena suatu penyedia jasa dalam perannya mengikuti proses pengadaan barang/jasa perlu mempersiapkan persyaratan administrasi yang lengkap dan legal secara hukum. jika ditinjau dari indikator penelitian, ditemukan bahwa indikator (i) tidak termasuk dalam pengawasan pengadilan dan (ii) tidak termasuk dalam urutan daftar hitam merupakan indikator yang paling penting dalam mempengaruhi pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi secara *e-purchasing* di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. Artinya bahwa pengguna jasa dalam proses pemilihan penyedia jasa sangat mengedepankan status hukum dari penyedia jasa sehingga diharapkan pengguna jasa dapat mengantisipasi timbulnya hal-hal yang bersifat cacat hukum pada saat pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akdon and S. Hadi, *Aplikasi Statistika dan Metode Penelitian Administrasi dan Manajemen*. Bandung: Dewa

- Ruchi, 2005.
- [2] A. Ningsih, A. Fudholi, and Sumarni, "Hubungan Penerapan Elektronik Katalog Terhadap Efisiensi Pengadaan dan Ketersediaan Obat," *J. Manaj. dan Pelayanan Farm.*, 2015.
- [3] Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta, "Anggaran dan Kegiatan Dinas Bina Marga Provinsi DKI," DKI Jakarta, 2020.
- [4] D. Rizkiani, "Perbedaan Efektivitas Pengadaan Pemerintah Sebelum dan Setelah Implementasi E-Purchasing Menurut Persepsi Penyedia Bidang Usaha Komunikasi dan Informatika," Universitas Jenderal Soedirman, 2017.
- [5] F. Rahadian, A. Djunaedi, and A. Suswantono, "Analisis Penerimaan dan Kepuasan Pengguna terhadap Aplikasi E-Purchasing dengan Model Integrasi," *Teknol. Inf. dan Multimed.*, 2015.
- [6] G. N. Pio, I. N. Sutarja, and I. W. Yansen, "Analisis Faktor-faktor Pemilihan Pemenang Lelang Jasa Konstruksi Pada Proyek Pemerintah di Kabupaten Sikka," *J. Spektran*, vol. 3, no. 2, 2015.
- [7] Hartono, *Statistik untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- [8] Kim, D., H. P. Nugroho, and A. Afifi, "Enhancing Efficiency of National Budget Execution through Advanced Public Procurement System," 2013.
- [9] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), "KPK Sudah Tangani 1.194 Kasus Korupsi, Mayoritas Penyuapan," *Cindy Mutia Annur*, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/data-publish/2022/01/10/kpk-sudah-tangani-1194-kasus-korupsi-mayoritas-penyuapan> (accessed Feb. 28, 2022).
- [10] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- [11] P. E. Mulyono, "Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Gresik," *Airlangga Dev. J.*, vol. 1, no. 1, pp. 32–42, 2017.
- [12] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." 2015.
- [13] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." 2012.
- [14] R. A. Wibowo, "Mencegah Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa: Apa Yang Sudah dan Yang Masih Harus Dilakukan?," *Integritas*, vol. 1, pp. 37–60, 2015.
- [15] R. R. M. Rooshdi, M. Z. A. Majid, S. R. Sahamir, and N. A. A. Ismail, "Relative Importance Index of Sustainable Design and Construction Activities Criteria for Green Highway," *Chem. Eng. Trans.*, vol. 63, 2018, doi: 10.3303/CET1863026.
- [16] S. Sutriatmoko and D. A. Puspendari, "Analisis Penerapan E-Procurement Obat dengan Prosedur E-Purchasing Berdasar E-Catalogue di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah," *Manaj. dan Pelayanan Farm.*, vol. 5, no. 4, pp. 267–264, 2015.
- [17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet, 2016.
- [18] W. Hartono, L. Nurhidayah, and Sugiyarto, "Pemilihan Rekanan Jasa Konstruksi/Kontraktor Dengan Metode AHP (Studi Kasus Pengadaan di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta," *Matriks Tek. Sipil*, vol. 4, no. 1, 2016.
- [19] W. Siahaya, *Manajemen Pengadaan Procurement Management*. Bandung: Alfabeta, 2012.

- [20] World Bank, Asian Development Bank, and I. D. Bank, "Electronic Government Procurement - Roadmap," 2004.
- [21] Y. Malinda and S. Hardjomuljadi, "Faktor Kendala Dominan Penggunaan E-Catalogue Pada Proses Pengadaan Proyek Konstruksi Jalan Dengan Metoda SPSS & RII," vol. 7, no. 2, pp. 90–105, 2018.

